

# BAB IV

## ISU-ISU STRATEGIS

---

### 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup mengembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai seperti yang telah digambarkan di Bab II dalam dokumen RPJMD Kota Palu ini. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidup serta infrastruktur daerah yang merupakan gambaran permasalahan daerah dalam skala makro.

Permasalahan daerah juga dapat di tinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu

#### 4.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Urusan pemerintahan wajib, menurut undang-undang 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

**Tabel 4.1**  
**Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan**  
**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan**  
**Dasar**

No	Bidang	Permasalahan
1	<b>Pendidikan</b>	• Mutu lulusan hasil UN rendah
		• Tenaga pendidik berkompentensi tidak merata
		• Kurikulum 2013 belum terlaksana secara merata
		• Kurangnya Infrastruktur sekolah PAUD
		• Alokasi penganggaran untuk PAUD Kurang memadainya
		• Masih terdapat anak putus sekolah
2	<b>Kesehatan</b>	• Angka harapan hidup Kota Palu mengalami penurunan
		• Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang masih rendah
		• Rasio dokter spesialis yang masih kurang di Kota Palu
		• Kecukupan sarana kesehatan puskesmas, pustu belum sesuai stadar
		• Kurangnya upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat
		• Rendahnya akses sanitasi yang layak
		• Adanya peningkatan resiko penyakit berbasis lingkungan
		• Peningkatan resiko penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja

No	Bidang	Permasalahan
3	<b>Pekerjaan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banjir dan air yang tergenang di jalanan karena tidak adanya saluran di sisi jalan mengarah ke bawah trotoar yang berlanjut ke drainase sekunder</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan dan kelayakan air bersih belum mencukupi dan memenuhi syarat</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan sumur suntik yang tidak terkendali</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana sosial dan hiburan masyarakat masih kurang dan tidak dikelola dengan baik</li> </ul>
4	<b>Penataan ruang dan pertanahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidajelasan peruntukkan ruang di Kota Palu menurut Kelurahan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak rumah tidak huni di pinggiran Kota Palu</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pendataan pertanahan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya konflik batas wilayah dalam Kota Palu</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya pemahaman masyarakat tentang Perencanaan berbasis bencana Gempa</li> </ul>
5	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih sering terjadinya konflik antar kelurahan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keamanan lingkungan secara mandiri</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya jiwa gotong-royong di dalam kehidupan masyarakat</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok bermotor (Begal)</li> </ul>
6	<b>Sosial dan Pemberdayaan masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya pemberdayaan kemiskinan di perkotaan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pengguna NAPZA</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya Perlindungan para pekerja migran (<i>Fair Migran</i>)</li> </ul>

No	Bidang	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembinaan eks trauma (narkoba, HIV/AIDS)</li> <li>• Minimnya Pemberdayaan terhadap penyandang Disabilitas</li> <li>• Minimnya Pemberdayaan masyarakat korban konflik sosial</li> <li>• Minimnya pelayanan anak dan Pemberian Bantuan UEP terhadap lansia</li> <li>• Minimnya Pemberdayaan thdp fakir miskin</li> <li>• Minimnya Pembinaan kepada para GEPENG</li> <li>• Minimnya Pendidikan dan pelatihan program pengurangan Pekerja anak (PPAPKH)</li> </ul>

#### 4.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan**  
**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan**  
**Dasar**

No.	Bidang	Permasalahan
1	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pekerja anak</li> <li>• Banyaknya pengangguran dan kurangnya tenaga profesional</li> <li>• Kurangnya peran swasta dan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja</li> <li>• Regulasi tenaga kerja yang dilatar belakangi oleh kurangnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja</li> </ul>

No.	Bidang	Permasalahan
2	<b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>	• Meningkatnya prostitusi dan trafficking di kota palu
		• Mulai munculnya anak jalanan dan pekerja anak
		• Terjadinya konflik di Kelurahan yang merugikan perempuan dan anak
		• Perlindungan anak diwilayah konflik
		• Sarana dan prasarana pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) belum memadai
		• Akses perempuan pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah
3	<b>Pangan</b>	• Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Palu
		• Rendahnya kompetensi SDM penyuluh
		• Minimnya sarana dan prasarana penyuluhan
		• Kurangnya lahan pertanian
		• Minimnya ketersediaan pangan dan distribusi pangan
5	<b>Lingkungan Hidup dan kehutanan</b>	• Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang
		• Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah
		• Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau
		• Masih kurangnya sampah yang di kelola oleh masyarakat
		• Kurangnya penghijuan di setiap pinggir jalan
		• Belum terzonafikasi pengelolaan sampah dengan baik
		• Belum ditanganinya secara baik limbah industri, manusia, hewan
		• Isu energi dan isu industri, tataruang, lahan Kritis yang tidak dimanfaatkan
		• Belum optimalnya pengelolaan hutan kota

No.	Bidang	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya rehabilitasi lahan bekas pertambangan</li> <li>• Pelanggaran pemanfaatan hutan konservasi untuk pertambangan</li> <li>• Adanya pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan dan penggalian dalam Kota Palu,</li> <li>• Adanya sedimentasi pesisir pantai, adanya reklamasi pantai, rusaknya Biota pantai, serta adanya efek rumah kaca</li> </ul>
6	<b>Kependudukan dan catatan sipil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka urbanisasi</li> <li>• Administrasi kependudukan yang belum efektif</li> <li>• Kurangnya Validitas data monografi kependudukan</li> <li>• Rendahnya integritas pelayanan</li> </ul>
7	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi program - program terkait pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Lemahnya Kepedulian sosial masyarakat</li> <li>• Kurang optimalnya proses pelaksanaan musyawarah pembangunan di kelurahan</li> <li>• Adanya tumpang tindih / Overlap tupoksi (Program dan kegiatan) Antar lembaga / SKPD</li> <li>• Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat</li> </ul>
8	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya rasio akseptor KB di Kota Palu</li> <li>• Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS)</li> <li>• Belum optimalnya pelayanan kotrasepsi di puskesmas</li> </ul>
9	<b>Perhubungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya trayek angkutan umum dalam kota</li> <li>• Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami penurunan</li> <li>• Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan barang</li> </ul>

No.	Bidang	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya sarana dan prasarana transportasi massal berupa bus trans Palu-Donggala-Sigi (Pagidong)</li> </ul>
10	Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua akses informasi secara tersediaan realtime</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai Good Governance</li> <li>• Belum berjalannya pelayanan publik yang berkualitas berbasis IT</li> <li>• Masih kurangnya sumber daya manusia bidang TIK yang handal dan profesional</li> </ul>
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum berkembangnya industri kreatif berbasis sumberdaya lokal</li> <li>• Pembinaan berkisambungan yang masih kurang</li> <li>• Terkendala aksesibilitas pelaku usaha mikro dan kecil dengan lembaga keuangan</li> <li>• Masih kurangnya penyediaan lahan untuk sentra UMKM berbasis komoditi</li> <li>• Jumlah koperasi tidak aktif semakin banyak</li> <li>• Belum adanya data dasar UMKM pelaku usaha kuliner, pengrajin tangan, dan lain-lain</li> </ul>
12	Penanaman Modal dan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu berbasis Teknologi Informasi belum optimal</li> <li>• Kualitas dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan masih sangat minim</li> <li>• Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor antar Penyelenggara PTSP dan SKPD Tekhnis perlu Sinergitas dan sinkronisasi prinsip dan mekanisme pelayanan perizinan</li> <li>• Jumlah Sumber Daya Manusia yang sesuai kompetensi masih kurang</li> </ul>

No.	Bidang	Permasalahan
13	Pemudaan dan Olah Raga	• Sarana dan prasarana olahraga masih sangat terbatas
		• Pembinaan olahragawan dan usia dini belum berjalan maksimal
		• Minimnya pembinaan dan pelatihan secara kontinyu terhadap atlit
		• Minimnya penghargaan terhadap olahragawan yang berprestasi
		• Belum ada penetapan cabang olahraga unggulan di Kota Palu
10	Informatika	• Belum semua akses informasi secara tersediaan realtime
		• Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai Good Governance
		• Belum berjalannya pelayanan publik yang berkualitas berbasis IT
		• Masih kurangnya sumber daya manusia bidang TIK yang handal dan profesional
14	Statistik	• Belum terintegrasinya data seluruh SKPD
		• Belum adanya sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pendataan
		• Kurangnya komitmen pemilik data dalam upaya mengintegrasikan data sektoral
		• Sumberdaya aparatur pengelola data masih sangat kurang
15	Persandian	• Belum terbentuknya kelembagaan persandian di Kota Palu
17	Perpustakaan	• Rendahnya minat baca penduduk Kota Palu
		• Kurang koleksi bahan pustaka
		• Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan
18	Kearsipan	• Koordinasi antar SKPD belum sinergi
		• Belum tersedianya depo arsip
		• Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi
		• Rendahnya pemahaman peraturan perundang-undangan kearsipan



No.	Bidang	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kesadaran aparaturnya dalam pengelolaan arsip</li> </ul>

#### 4.1.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu teridentifikasi sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Permasalahan Kota Palu**  
**Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan**

No	Urusan	Permasalahan
1	<b>Perikanan dan Kelautan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya lahan budidaya rumput laut akibat pembangunan dermaga perusahaan galian C</li> <li>Semakin meningkat transformasi pekerjaan nelayan ke sektor industri dan perdagangan</li> <li>Menurunnya hasil produksi perikanan tangkap tiga tahun terakhir</li> <li>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pada budidaya perikanan darat</li> </ul>
2	<b>Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata</li> <li>Belum dikembangkannya paket wisata unggulan</li> <li>Belum terkoordinasi dengan baik pembangunan objek wisata dengan lembaga dunia usaha</li> <li>Belum ada rencana induk pariwisata daerah (RIPDA) Kota Palu</li> <li>Belum maksimalnya berperannya organisasi, birokrasi, swasta, profesi dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan</li> <li>Kurangnya sumber daya manusia pariwisata</li> <li>Belum maksimalnya pemanfaatan</li> </ul>

No	Urusan	Permasalahan
		<p>teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terorganisirnya event seni, budaya dan pariwisata daerah</li> <li>• Belum dikembangkan ekonomi kreatif seni dan budaya</li> <li>• Belum tersedianya informasi sumber daya budaya yang akurat dan terpercaya dan dapat diakses secara mudah dan cepat</li> <li>• Pengelolaan situs cagar budaya Kota Palu masih kurang</li> <li>• Belum optimalnya pembinaan pada sanggar seni</li> <li>• Mulai hilangnya nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kota</li> <li>• Tidak berjalannya adat budaya yang berlaku di dalam masyarakat</li> </ul>
3	<b>Pertanian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya lahan pertanian di Kota Palu</li> <li>• Semakin meningkat alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman</li> <li>• Menurunnya produktivitas tanam padi</li> <li>• Produksi tanaman padi mengalami penurunan</li> </ul>
4	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya biaya pemeliharaan dan operasional Penerangan Jalan Umum (PJU)</li> <li>• Penanganan air tanah belum maksimal</li> </ul>
5	<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor perdagangan semakin menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir</li> <li>• Kontribusi sektor perindustrian semakin menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir</li> <li>• Belum tumbuhnya investasi di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus</li> </ul>

#### 4.1.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu.

Urusan penunjang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut beberapa permasalahan berkaitan urusan penunjang Pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Permasalahan Kota Palu**  
**Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang**

No	Bidang	Permasalahan
1	Perencanaan	• Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat
		• Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan musrembang
		• Kurang terakomundirnya hasil usulan masyarakat dalam musrembang
		• Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan
		• Kurangnya pemahaman dalam mensinkronkan perencanaan SKPD dengan
2	Keuangan	• Lemahnya pengawasan atas pengelolaan Kas
		• Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
		• Laporan keuangan belum akuntabel
		• Penyusunan anggaran belum memprioritaskan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar / masyarakat
3	Pendapatan	• Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah
		• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah
		• Belum dimanfaatkan secara optimal sistem informasi teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah

No	Bidang	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terintegrasinya sistem informasi yang mengintegrasikan lembaga pengelola pajak dan retribusi dengan lembaga perbankan</li> <li>• Kualitas sumber daya pengelola pendapatan daerah belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan pengelola pendapatan daerah</li> </ul>
4	<b>Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah melalui bimbingan teknis dan non teknis</li> <li>• Masih relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan aparatur daerah</li> </ul>
5	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terkoordinasinya kebutuhan hasil penelitian pada masing-masing dinas</li> <li>• Banyaknya hasil penelitian yang kurang terimplementasi</li> <li>• Masih sedikit kebijakan pemerintah yang di backup oleh hasil penelitian</li> <li>• Sumberdaya aparatur dalam bidang penelitian masih sangat minim</li> </ul>
6	<b>Pemerintahan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran koordinasi antar SKPD</li> <li>• Reward and punishmen kurang diterapkan pada proses Pengawasan</li> </ul>

#### 4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis meliputi isu strategis internasional, isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah, isu strategis Kota Palu. Isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

1. Kriteria-1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
2. Kriteria-2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Kriteria-3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
4. Kriteria-4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah
5. Kriteria-5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
6. Kriteria-6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Beberapa isu global yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kota Palu selama periode RPJMD ini antara lain.

#### **4.2.1 Isu Strategis Internasional**

##### **1. Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) / AEC (Asean Economic Community) bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA tidak terjadi.

Kota Palu dalam menghadapi menghadapi MEA tentunya akan mengambil peluang dengan terciptanya pasar bebas ASEAN, terlebih pengembangan industri yang didorong melalui kebijakan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus KEK Kota Palu. Diharapkan dengan keberadaan KEK akan

menumbuhkan perdagangan ekspor produk hasil olahan yang dilakukan di KEK Palu, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. peluang pasar juga akan dapat dimanfaatkan khususnya usaha kecil dan menengah pengelola sumberdaya lokal unggulan seperti kerajinan rotan, bawang goreng, bambu, kakao dan beberapa komoditas lainnya. Keunggulan komparatif atau keunikan dari sisi bahan baku ini akan mampu bersaing bila di dukung dengan sentuhan teknologi yang lebih baik. Pada akhirnya diharapkan keberadaan MEA akan membuka pasar baru bagi perkembangan UMKM di Kota Palu.

Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan bagi Kota Palu dalam menghadapi MEA. Hambatan tersebut di antaranya :

1. Mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya masih lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan di atasnya di Kota Palu
2. Ketersediaan dan kualitas infrastuktur jalan dan fasilitas pelabuhan Pantoloan yang masih sangat terbatas daya tampungnya, sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa keluar Kota Palu. Menurut Global Competitiveness Index (GCI) 2014, kualitas infrastruktur Indonesia kita masih tertinggal dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.
3. Keterbatasan pasokan energi, hingga saat ini pasokan energi listrik Kota Palu masih menjadi kendala untuk mengembangkan industri
4. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia.

Apabila hambatan-hambatan tadi tidak diatasi maka dikhawatirkan MEA justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia mewujudkan MEA berupa pertama, adanya perbedaan latar belakang di balik

pembentukannya yakni dominasi spirit bagi menjaga stabilitas kawasan lebih dominan dibandingkan keinginan mewujudkan kemajuan ekonomi.

## **2. Sustainable Development Goals (SDGs)**

Tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 193 negara anggotanya akan mengajukan sebuah roadmap baru dalam pembangunan internasional untuk menentukan Sustainable Development Goals yang baru. Roadmap ini akan menggantikan Millennium Development Goals yang telah digunakan sebagai acuan untuk prioritas bantuan yang diberikan oleh luar negeri. Kerangka pembangunan baru tersebut akan diinformasikan oleh PBB melalui proses konsultasi yang secara global.

SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan. Tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* tidak berbeda jauh dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim.

SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan oleh bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi

perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 tujuan Global sebagai berikut :

1. *No poverty*
2. *Zero Hunger*
3. *Good Healt and well being*
4. *Quality Education*
5. *Gender quality*
6. *Clean Water and Sanitation*
7. *Afordable clean Energy*
8. *Decent and Growth*
9. *Industry Innovation and Manufacture*
10. *Reduce Inequalities*
11. *Sustainable cities and communities*
12. *Responsible consumption and production*
13. *Cilmate action*
14. *Life below water*
15. *Life on land*
16. *Peace and justice strong institutions*
17. *Partnership for the goals*

Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi, merupakan barometer bagi daerah lain khususnya kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, menjadikan pencapaian tujuan SDGs sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat. Dalam pencapaian program MDGs Kota Palu tahun 2015, target capaian yang telah ditetapkan masih belum semua dapat terwujud. Beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kota Palu adalah laju pertumbuhan PDB perlapangan pekerjaan, angka kematian ibu, penggunaan kontrasepsi dan penyebaran penyakit menular. Tentunya ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Palu untuk mendorong upaya pencapaian target, sebelum ditetapkannya indikator SDGs nanti.



### **3. Pemanasan Global (*Global warming*)**

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan. Penelitian yang telah dilakukan para ahli selama beberapa dekade terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata makin panasnya planet bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktifitas manusia. Khusus untuk mengawasi sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk sebuah kelompok peneliti yang disebut dengan International Panel on Climate Change (IPCC). Setiap beberapa tahun sekali, ribuan ahli dan peneliti-peneliti terbaik dunia yang tergabung dalam IPCC mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan penemuan-penemuan terbaru yang berhubungan dengan pemanasan global, dan membuat kesimpulan dari laporan dan penemuan-penemuan baru yang berhasil dikumpulkan, kemudian membuat persetujuan untuk solusi dari masalah tersebut. Salah satu hal pertama yang mereka temukan adalah bahwa beberapa jenis gas rumah kaca bertanggung jawab langsung terhadap pemanasan yang kita alami, dan manusialah kontributor terbesar dari terciptanya gas-gas rumah kaca tersebut. Kebanyakan dari gas rumah kaca ini dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, peternakan, serta pembangkit tenaga listrik.

Pemanasan global menimbulkan pencairan es di artic (kutub utara) yang menimbulkan kenaikan pada permukaan air laut. Akibatnya terjadi perubahan musim, el-nino, la nina, anomali cuaca menimbulkan perubahan dan kacaunya iklim yang selanjutnya berpengaruh pada musim tanam petani dan kacaunya ekosistem biota laut.

Upaya pemerintah Kota Palu dalam menanggulangi pemanasan global juga telah dilakukan melalui konservasi hutan mangrove di sekitar pesisir pantai. Namunpun demikian permasalahan pembangunan reklamasi pantai

juga menjadi masalah tersendiri dalam kaitannya pencemaran dan merusak biota laut, yang nantinya akan mempengaruhi ekosistem laut yang telah ada. Peran keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan yang berkesinambungan menjadi fokus utama pemerintah Kota Palu untuk mendukung salah satu kondisi yang diharapkan oleh dunia sebagai paru-paru dunia.

#### **4.2.2 Isu Strategis Nasional**

##### **1. Sistem Transportasi Kota**

Pembangunan transportasi di perkotaan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan bandar udara, transportasi laut dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Kondisi jalan di wilayah perkotaan sebagian besar bermasalah dari sisi kapasitas jalan sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota. Penambahan ruas jalan yang hanya sekitar 1 (satu) persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 11 persen per tahun. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan di beberapa Kota di Kota Palu.

Hampir semua ruas jalan arteri perkotaan di Indonesia sudah mengalami kemacetan. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu.

Beberapa kota besar di Indonesia memiliki sistem dan jaringan transportasi multimoda belum terintegrasi dengan baik menyebabkan tidak efisien dan efektifnya mobilitas penduduk. Sistem transportasi angkutan jalan raya tidak terhubung dengan baik dengan sistem dan jaringan

transportasi berbasis rel. Begitu pula sistem dan jaringan angkutan bus massal belum terintegrasi dengan sistem angkutan feeder yang melayani permukiman masyarakat.

Kebutuhan angkutan masal menjadi sebuah keharusan khususnya bagi daerah perkotaan di Indonesia tidak terkecuali Kota Palu yang merupakan ibukota provinsi. Kondisi yang sama juga mulai terjadi di Kota Palu, dimana pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat meningkat tidak dibarengi dengan pertumbuhan panjang jalan. Kemudahan masyarakat membeli kendaraan khususnya roda dua menjadi salah satu penyebab mudahnya mereka dapat membeli kendaraan pribadi, terlebih semakin menurunnya moda angkutan umum di Kota Palu.

## **2. Lemahnya Sistem Informasi Daerah**

Sistem informasi saat ini berkembang dengan pesat dan makin bernilai tinggi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi yang dapat berjalan secara online memudahkan penggunanya untuk mengakses data dimana saja dan kapan saja. Dan sistem informasi yang dibangun tepat akan memberikan sebuah gambaran kinerja organisasi yang akurat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan. Itulah yang saat ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau perkembangan pemerintah dengan membangun sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Pembangunan Sistem Informasi tersebut dilatarbelakangi lemahnya pemanfaatan data-data pembangunan. Hal itu didasari pula karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD serta tidak diperbaharui secara berkala, kemudian Instansi yang berfungsi sebagai unit perencanaan pemerintah dalam hal ini BAPPEDA mengalami kendala dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD di daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah selain mengatasi kendala diatas juga merupakan amanah dari UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ganti dengan UU 23 Tahun 2014. Kebijakan ini kemudian bentuk dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaannya.

Kota Palu yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami kondisi yang sama dalam kaitannya dengan penyediaan sistem informasi yang akan digunakan sebagai basis data perencanaan. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sumberdaya manusia yang menguasai teknologi informasi, sarana teknologi informasi yang masih sederhana dan ketersediaan data spasial yang masih lemah dalam validitas.

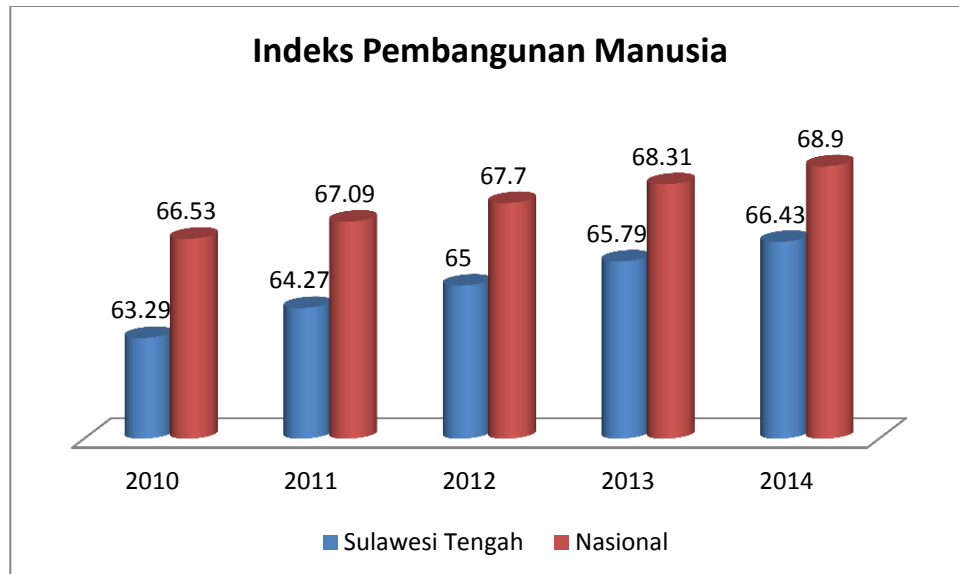
#### **4.2.3 Isu Strategis Sulawesi Tengah**

##### **1. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Saat ini IPM Sulawesi Tengah masuk pada peringkat 22 dari 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan Data Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2015, selama periode 2011-2015, IPM Sulawesi Tengah dibandingkan

Nasional masih terdapat selisih yang cukup besar, seperti terlihat pada Grafik di bawah ini :



Gambar 4.1 : Indeks Pembangunan Manusia

Sumber : BPS Sulawesi Tengah 2015

Apabila dilihat dari Pertumbuhan Indeks pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah mengalami trend positif setiap tahunnya, yang dimaknai bahwa kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat setiap tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi apabila dilihat dari perbandingan nasional, Provinsi Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata nasional. Ada beberapa poin dapat menjelaskan fenomena ini.

**Pertama**, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah merupakan laju pertumbuhan yang semu (*quasy growth*). Pertumbuhan ekonomi yang semu didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi yang meningkat terjadi pada konsumsi bahan makanan yang memang menjadi kebutuhan pokok. Akibatnya, simpanan masyarakat pun tergerus untuk menutupi peningkatan konsumsi yang mendesak ini. Sayangnya, konsumsi ini tercipta pada masyarakat yang bersifat *demonstration effect* atau saling meniru dalam membeli barang dan fenomena persaingan dalam konsumsi. Akibat selanjutnya, daya beli masyarakat pastilah menurun yang selanjutnya berdampak pada menurunnya derajat kesehatan masyarakat dan

meningkatnya angka usia putus sekolah. Akibat paling akhir adalah loss generation dapat melanda provinsi ini. Fenomena lain umumnya, pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia (KTI) banyak didorong oleh sektor-sektor berbasis pada sumberdaya alam. Jadi sifatnya pertumbuhan alamiah. Berbeda dengan provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan jasa yang didorong oleh produktivitas tenaga dan modal yang tinggi. Di sisi lain, sayangnya baik Indonesia maupun masing-masing daerah belum mempunyai *Green Gross Domestic Product (GGDP)* atau *Green Gross Domestic Regional Product (GGDRP)* yang memperhitungkan kerusakan lingkungan termasuk degradasi hutan yang sekarang meningkat dari 14 kali lapangan sepakbola menjadi 400 kali lapangan sepakbola dalam sehari dan degradasi kesehatan akibat merkurisasi udara Kota Palu akibat eksplorasi tambang Poboya dan lemahnya tindakan tegas pengambil kebijakan. Di samping itu, telah lama para ekonom tidak lagi menggunakan laju pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator kinerja ekonomi karena biasanya indikator ini.

**Kedua**, pemerintah Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota belum mampu mengendalikan inflasi, apalagi pengendalian harga-harga telah diserahkan kepada mekanisme pasar. Inilah liberalisasi ekonomi yang kebablasan pemerintah Indonesia yang berdampak ke daerah. Jika ditelusuri, secara nasional, ada dua penyebab utamanya hingga terjadi inflasi kronis itu: (1) karena tarikan permintaan barang dan (2) karena dorongan peningkatan biaya produksi. Bahan makanan merupakan penyumbang terbesar inflasi. Menariknya, beras ternyata merupakan penyumbang terbesar inflasi bahan makanan.

**Ketiga**, dari sisi pendidikan, masih tingginya angka tidak tamat SD, tingginya angka tidak tamat SD ini seharusnya menjadi karena sangat menentukan pelaksanaan wajib belajar (wajib) 9 tahun dan selama ini cabang dinas pendidikan (Cabdis) di kecamatan belum optimal diberdayakan oleh Dinas Pendidikan setempat. Tinggi angka putus sekolah ini

kemungkinan berkaitan erat dengan kenaikan harga walaupun orang tua murid tingkat SD tidak perlu lagi mengeluarkan biaya SPP. Dalam jangka panjang, fenomena ini menyulitkan Sulawesi Tengah bertransformasi dari sektor pertanian ke industri pengolahan dan jasa tanpa melupakan keterkaitan antara ketiga sektor tersebut. Dalam panjang, sulit rasanya mengubah dominasi lapangan kerja di sektor informal yang mencapai 80% dari total penduduk.

**Keempat**, dari sisi lapangan kerja, Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum maksimal dalam menciptakan lapangan kerja yang pasti bagi pencari kerja yang merupakan lulusan berbagai jenjang pendidikan. Apalagi secara relatif tanpa adanya investasi yang menyerap tenaga kerja. Jika pun ada, para pencari kerja hanya mengharapkan menjadi PNS dan lapangan kerja yang tercipta hanya terjadi secara alamiah. Dominasi penduduk di sektor informal dapat juga merupakan indikator bertransformasinya pelaku wirausaha dari usaha kecil menengah (UKM) menjadi pelaku sektor informal karena gagalnya program pemerintah daerah keberpihakan pada sektor pertanian sebagai sektor ganda baik sebagai sektor utama Sulawesi Tengah maupun pencipta lapangan kerja di perdesaan belum terlihat.

## **2. Kondisi Keamanan Daerah**

Salah satu syarat dalam membangun iklim investasi adalah ketersediaan suprastruktur atau kondisi non fisik yang terbangun di suatu daerah, hal ini dapat dirasakan melalui rasa aman dan nyaman bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Penciptaan rasa aman dan nyaman bagi investor dapat dilihat dari kondisi keamanan daerah, suhu politik dan kepastian hukum yang berlaku.

Khusus keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini masih tergolong kurang menguntungkan bagi investor. Isu konflik yang sering terjadi khususnya Kabupaten Poso, Sigi dan bahkan Kota Palu menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Stigma Sulawesi Tengah sebagai

daerah yang belum aman sebagai konsekuensi dari konflik horizontal di Poso pada tahun 2000 masih melekat setiap orang yang berasal dari luar Sulawesi Tengah ketika akan datang ke wilayah ini. Berita perkelahian antar desa yang sering terjadi di wilayah Sigi yang sering terjadi bahkan menimbulkan korban jiwa menjadikan penilaian negatif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu.

#### **4. Kelangkaan Energi**

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memasuki usia ke-52 tahun. Meski memasuki usia yang terbilang cukup matang, namun kebanyakan daerah tersebut masih saja dilanda oleh krisis listrik. Sejumlah wilayah, termasuk Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng, hingga kini masih mengalami krisis listrik. Selain masih krisis listrik, tambahnya, juga banyak desa dan kecamatan yang sampai sekarang ini belum terjangkau listrik PLN. Ia berharap Pemerintah Provinsi Sulteng bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mengatasi krisis listrik yang sedang melanda sejumlah wilayah di provinsi ini.

Begitu pula desa dan kecamatan yang belum terjangkau penerangan listrik dari PLN, lanjutnya, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Setidaknya ada dua kecamatan di Kabupaten Sigi yang belum terjangkau listrik dan prasana jalan memadai yaitu Lindu dan Pipikoro. Padahal kedua kecamatan di Kabupaten Sigi itu hanya sekitar 100 km dari Kota Palu.

Berdasarkan beberapa uraian isu strategis yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan keterkaitan isu strategis tersebut dalam matriks kesesinggungan isu lingkungan internal dengan permasalahan lokal Kota Palu sebagai berikut :



**Tabel 4.5**  
**Isu Strategis Internasional, Nasional dan Regional**

No	ISU STRATEGIS		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
	<p><b>Masyarakat Ekonomi ASEAN,</b> Dengan berlakunya MEA maka Pemerintah Kota Palu dituntut untuk menyiapkan SDM yang mampu bersaing di kancah internasional. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan MEA bagi Kota Palu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kualitas tenaga kerja</li> <li>2. Kurangnya infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi</li> <li>3. Belum memadainya ketersediaan energi ramah lingkungan</li> <li>4. Masih lemahnya usaha kecil dan menengah</li> </ol>	<p><b>Sistem transportasi perkotaan.</b> Pembangunan transportasi di perkotaan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan bandar udara, transportasi laut dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.berikut beberapa hal terkait lemahnya transportasi perkotaan yang berkaitan dengan sistem stransportasi Kota Palu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terkelolanya transportasi umum Kota Palu, yang mencerminkan</li> </ol>	<p><b>Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah.</b> Pertumbuhan Indeks pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah mengalami trend positif setiap tahunnya, yang dimaknai bahwa kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat setiap tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi apabila dilihat dari perbandingan nasional, Provinsi Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata nasional. Beberapa hal di bawah ini yang menjadi tantangan bagi Kota Palu untuk mendukung peningkatan IPM Sulswesi Tengah, yang juga merupakan isu strategis Kota Palu :</p>

No	ISU STRATEGIS		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
		<p>transportasi umum perkotaan</p> <p>2. Tidak terintegrasinya sarana transportasi udara, darat dan laut dalam sebuah sistem transportasi umum Kota</p>	<p>1. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Palu</p> <p>2. Upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang murah dan terjangkau</p> <p>3. Pelayanan kesehatan yang masih mahal dan belum merata kualitasnya di beberapa kecamatan</p>
	<p><b>Sustainable Development Goals (SDGs)</b> kesepakatan global ini menjadi tantangan kepada Pemerintah Kota Palu untuk mampu mencapai target yang telah ditentukan beberapa tantangan bagi Kota Palu dalam kaitannya dengan SDGs adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pengentasan kemiskinan Kota</li> <li>2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>3. Ketahanan Pangan</li> </ol>	<p><b>Lemahnya Sistem Informasi Daerah.</b> Sistem Informasi Pembangunan Daerah selain mengatasi kendala diatas juga merupakan amanah dari UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ganti dengan UU 23 Tahun 2014. Kebijakan ini kemudian bentuk dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<p><b>Kondisi Keamanan Daerah.</b> eamanan di Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini masih tergolong kurang menguntungkan bagi investor. Isu konflik yang sering terjadi khususnya Kabupaten Poso, Sigi dan bahkan Kota Palu menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Dampak dari isu regional ini mempengaruhi beberapa aspek pembangunan dan juga</p>

No	ISU STRATEGIS		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
	4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan 5. Menjaga lingkungan hidup perkotaan 6. Penguatan UMKM di tiap kelurahan 7. Keamanan lingkungan	Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Berikut gambaran keterkaitan isu berkaitan dengan sistem informasi nasional bagi perkembangan Kota Palu. 1. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi sumberdaya berbasis GIS 2. Belum terintegrasinya sistem informasi antar perangkat daerah untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam perencanaan daerah	menjadi isu strategis Kota Palu sebagai berikut : 1. Menurunnya nilai-nilai budaya lokal di dalam sendi-sendi berkehidupan masyarakat 2. Dampak konflik juga mewarnai beberapa keluarahan di Kota Palu 3. Kurang berperannya lembaga adat dalam menanangi masalah konflik sosial masyarakat.
	<b>Pemanasan Global (Global warming)</b> Isu pemanasan global yang menjadi perhatian dunia untuk menjaga pelestarian lingkungan, sangat erat kaitannya dengan peran Kota Palu yang merupakan salah satu pendukung paru-		<b>Kelangkaan Energi,</b> Sejumlah wilayah, termasuk Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulteng, hingga kini masih mengalami krisis listrik. Selain masih krisis listrik, tambahnya, juga banyak

No	ISU STRATEGIS		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
	<p>paru dunia melalui kebijakan yang pro lingkungan. Berikut beberapa dampak isu lingkungan bagi arah kebijakan pemerintah Kota Palu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan lahan 30 persen bagi ruang terbuka hijau</li> <li>2. Pengelolaan sampah swadaya masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan</li> </ol>		<p>desa dan kecamatan yang sampai sekarang ini belum terjangkau listrik PLN. Krisis listrik tentunya mengakibatkan beberapa masalah dalam pembangunan Kota Palu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumberdaya listrik mempengaruhi aktivitas ekonomi khususnya UMKM</li> <li>2. Menjadi hambatan dalam pengembangan usaha kepariwisataan dan hospitality yang sangat membutuhkan ketersediaan listrik dalam operasinya</li> </ol>

#### **4.2.4 Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Lain.**

Dalam rangka penyesuaian pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam, maka perencanaan pembangunan Kota Palu juga meninjau beberapa isu daerah sekitarnya yang bersinggungan dengan Kota Palu sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Lain dan**

<b>Kabupaten Sigi</b>	<b>Keterkaitan</b>	<b>Kabupaten Parimo</b>	<b>Keterkaitan</b>	<b>Kabupaten Donggala</b>	<b>Keterkaitan</b>
Pembangunan pertanian belum optimal	Ketergantungan Kota Palu akan komoditas pertanian cukup tinggi, sehingga perlu koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan sektor pertanian	Masih kurangnya nilai tambah dari pengelolaan potensi perikanan dan kelautan	Penumbuhan UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan hasil perikanan akan meningkatkan nilai tambah dan perekonomian Kota Palu	Pembangunan berwawawasan lingkungan belum optimal	Dampak lingkungan akibat galian C dan reklamansi pantai Kabupaten Donggala terhadap perikanan dan kelautan serta polusi di Kota Palu
Masih kurangnya pengelolaan potensi pariwisata	Dibutuhkan sinergitas pengelolaan wisata bersama Palu-Sigi	Ketimpangan ekonomi di beberapa kecamatan	Kemiskinan di daerah terpencil akan mengakibatkan urbanisasi ke wilayah Kota Palu	Pengelolaan wisata bahari belum optimal	Dibutuhkan sinergitas pengelolaan wisata bersama Palu-Donggala
Ketimpangan ekonomi antar kecamatan	Kemiskinan di daerah terpencil akan mengakibatkan urbanisasi ke wilayah Kota Palu	Kualitas pendidikan yang masih rendah	Menjadikan Palu sebagai pusat layanan pendidikan bagi daerah interline	Kualitas pendidikan yang masih rendah	Menjadikan Palu sebagai pusat layanan pendidikan bagi daerah interline

<b>Kabupaten Sigi</b>	<b>Keterkaitan</b>	<b>Kabupaten Parimo</b>	<b>Keterkaitan</b>	<b>Kabupaten Donggala</b>	<b>Keterkaitan</b>
Ketersediaan infrastruktur belum memadai	Sinergi pengemabangan infrstruktur interline masing-masing wilayah	Kualitas layanan kesehatan yang belum prima dan	Menjadikan Palu sebagai pusat layanan kesehatan bagi daerah interline	Ketersediaan infrastruktur belum memadai	Sinergi pengemabangan infrstruktur interline masing-masing wilayah
Konflik horisontal antar daerah masih tinggi	Penyebaran konflik akan berdampak pada koflik yang terjadi di Kota Palu			Kualitas layanan kesehatan yang belum prima dan merata	Menjadikan Palu sebagai pusat layanan kesehatan bagi daerah interline
Kualitas pendidikan yang masih rendah	Menjadikan Palu sebagai pusat layanan pendidikan bagi daerah interline				
Kualitas layanan kesehatan yang belum prima dan merata	Menjadikan Palu sebagai pusat layanan kesehatan bagi daerah interline				

#### **4.2.5 Rekomendasi Isu Strategi KLHS**

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu tahun 2016-2021 Sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan 5 (lima) tahun kedepan di Kota Palu, diketahui terdapat 9 (sembilan) isu strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

- 1) Pertambangan;
- 2) Banjir di pemukiman dan daerah aliran sungai;
- 3) Pencemaran air tanah dan udara;
- 4) Sedimentasi dan abrasi pantai;
- 5) Ketersediaan air bersih belum memadai di beberapa wilayah;
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- 7) Peningkatan kriminalitas/begal;
- 8) Permukiman kumuh;
- 9) Terkikisnya nilai budaya lokal.

Dari hasil identifikasi isu strategis dan program prioritas, maka disusun mitigasi, adaptasi, alternatif dan rekomendasi bagi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan industri kecil dan menengah berwawasan lingkungan dengan melakukan mitigasi/adaptasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkannya melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pembangunan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong, pengendalian banjir, pembinaan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelembagaan adat.



2. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata berwawasan lingkungan dengan melakukan mitigasi/adaptasi/alternative dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkannya melalui peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) peningkatan sarana dan prasarana persampahan, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong pengendalian banjir, serta pengembangan pariwisata untuk mewujudkan palu sebagai kota destinasi.
3. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses kelancaran perekonomian untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan melakukan mitigasi/adaptasi/alternative dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkannya, melalui pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, pembangunan/rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta pengendalian banjir.

Pengembangan perumahan dilakukan pada lahan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, serta dengan melakukan mitigasi dan adaptasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkannya dengan memperhatikan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, pembangunan/rehabilitasi saluran drainasi/gorong-gorong pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, lingkungan sehat perumahan, peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh, pengendalian banjir, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta pengembangan bidang pengelolaan rusunawa.

#### **4.2.6 Isu Strategis Kota Palu**

##### **1. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Daerah**

Sistem informasi sudah menjadi isu nasional maupun internasional sebagai salah satu pendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan valid akan menghasilkan keputusan strategis yang tepat sasaran dan efisien dalam pengalokasian sumberdaya. Selain ketepatan dalam proses perencanaan, sistem informasi daerah yang terintegrasi antar bagian dalam organisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Kondisi saat ini, pemerintah daerah Kota Palu masih termasuk lemah dalam penyiapan informasi berkaitan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintah ditingkat bawah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan hingga koordinasi antar instansi pemerintah, menyebabkan lemahnya perencanaan pembangunan dalam hal efektifitas target dan sasaran serta efisiensi anggaran yang akan digunakan. Selain itu, hal ini akan berdampak pada mekanisme efektivitas evaluasi dan monitoring kegiatan pemerintah yang diharapkan akan menjadi kontrol pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan *smart city* melalui penyediaan sistem informasi yang berkualitas. Peningkatan kualitas sistem informasi daerah dimaksudkan untuk dapat menyiapkan data yang terintegrasi pada seluruh bagian pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah terkecil yaitu kelurahan, kecamatan serta satuan kerja perangkat daerah Kota Palu.

Ketersediaan data harus didukung oleh teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Upaya peningkatan sistem informasi daerah Kota Palu, selain menyediakan data juga menyediakan sistem informasi berbasis GIS yang dapat melacak data pada tingkatan satuan terkecil. Pemanfaatan GIS sebagai basis data akan menghasilkan data *by name, by address* pada tiap potensi sumberdaya yang dimiliki daerah.

Pemerintah Kota Palu dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi daerah, perlu membangun sinergitas antar bagian pemerintahan melalui data terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembentukan pusat data dan informasi menjadi bagian penting untuk segera diwujudkan. Pusat data yang dibangun akan berperan dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan data yang ada di masing sub sistem informasi pada tiap kelurahan, kecamatan, dan SKPD.

Capaian akhir yang diharapkan dalam isu strategis ini adalah menciptakan sistem informasi yang terintegrasi antara seluruh bagian tata kelola pemerintahan dari tingkat SKPD, Kecamatan hingga kelurahan. Dengan terintegrasinya sistem informasi potensi sumberdaya daerah maka pengambilan keputusan pimpinan dalam perencanaan pembangunan yang di lakukan akan lebih tepat target dan sarannya. Hasil akhirnya adalah efisiensi dan efektifitas pengalokasian dana pembangunan yang tepat sasaran.

## ***2. Pembangunan Pendidikan berkualitas dan Terjangkau***

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang salah satunya dicerminkan oleh kemudahan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan pendidikan dasar. Selain ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar juga harus melihat pemerataan pada masing-masing wilayah. Kondisi saat ini tingkat pemerataan yang masing kurang berimbang khususnya pada wilayah Kecamatan Ulujadi, Tawaeli, Palu Utara, dan Kecamatan Palu Barat. Upaya pemerintah Kota Palu dalam menyediakan sarana dan prasarana akan di arahkan pada empat wilayah kecamatan tersebut.

Selain sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan juga masih banyak terkendala dari sisi jumlah maupun kualitas. Sama halnya dengan pemerataan sarana prasarana pendidikan di atas, penguatan layanan pendidikan di Kota Palu juga di arahkan melalui pemerataan sumberdaya aparatur pendidikan. Upaya peningkatan kapasitas

pendidik perlu diupayakan, khususnya bagi pendidikan menengah pertama yang berbasis kejuruan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menciptakan anak didik yang mampu melakukan pengolahan sumberdaya potensi lokal, karena saat ini sumberdaya potensi lokal belum optimal di kelola dikarenakan keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia yang mengelola.

Isu strategis yang dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan pendidikan adalah meningkatkan aksesibilitas seluruh masyarakat Kota Palu pada layanan pendidikan. Pemerintah Kota Palu harus mampu menciptakan layanan pendidikan murah, mudah dan berkualitas, sehingga akan meningkat partisipasi masyarakat pada pendidikan di Kota Palu.

Peningkatan pendidikan masyarakat tidak boleh lepas dari peningkatan pemahaman akan budaya dan adat. Nilai-nilai luhur budaya saat ini harus tercermin dalam pola pendidikan Kota Palu. Dalam konsep pengembangan pendidikan, seorang pengajar tidak hanya melakukan tugas pengajaran namun juga terdapat tugas mendidik siswa melalui penanaman norma-norma budaya dan adat yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, program penguatan adat dan budaya di lingkungan pendidikan dasar harus dilakukan melalui, pemberdayaan sanggar seni pada tiap-tiap sekolah

### ***3. Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau***

Memberikan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat ditujukan untuk dapat meningkatkan cakupan layanan masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kota Palu yang merupakan tugas utama pemerintah untuk dapat mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi.

Kualitas kesehatan masyarakat dapat di ukur dari kemampuan masyarakat menjangkau layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Upaya pemerintah dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan adalah mengupayakan ketersediaan jumlah sarana

kesehatan, meringankan biaya pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Semakin besar *universal coverage* jaminan kesehatan akan memungkinkan semakin banyak masyarakat miskin kota yang akan menerima layanan kesehatan berkualitas.

Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selain meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan kepada masyarakat melalui program-program promosi kesehatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan didorong dengan upaya masyarakat menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga. Ketersediaan sanitasi yang memadai, jaringan air bersih yang digunakan, pengolahan limbah keluarga serta pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga.

#### **4. Kemiskinan Kota**

Seperti yang di amanahkan dalam pembangunan nasional bahwa penanganan kemiskinan merupakan tugas yang harus dilakukan lintas sektor dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kota Palu telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan beberapa sektor terkait dalam sebuah rancangan penanggulangan kemiskinan, telah mampu menurunkan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan Kota Palu paling rendah dibandingkan seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah. Tahun 2011 angka kemiskinan Kota Palu sebesar 9,24 persen, pada tahun 2011 – 2012 pertumbuhan angka kemiskinan menurun 7,1 persen menjadi 8,58 persen. Pertumbuhan penurunan angka kemiskinan tahun 2012 – 2013 menurun sangat signifikan yaitu sebesar 15,6 persen. Namun pada tahun 2013 – 2014 pertumbuhan penurunan angka kemiskinan menjadi lebih kecil atau sedikit mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 2,6 persen. Apabila di bandingkan

dengan pertumbuhan angka kemiskinan di tingkat provinsi, pertumbuhan kemiskinan provinsi dalam kurun waktu tahun 2011-2014 menunjukkan trend yang meningkat yaitu 5 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan mulai kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan Kota. Tentunya ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Peningkatan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan yang merupakan pilar dalam memotong rantai kemiskinan perlu menjadi perhatian lebih untuk menurunkan kemiskinan daerah.

#### ***5. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan***

Isu strategi pembangunan Kota Palu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di arahkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat kota. Pemerintah Kota Palu berupaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pengembangan UMKM di tiap perwilayah kelurahan. Menjadikan kelurahan yang inovatif yang mampu menciptakan daya saing bagi UMKM melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal.

Pemerintah di tingkat kelurahan di arahkan untuk mampu mengembangkan usaha ekonomi yang ada di wilayahnya dengan dukungan instansi terkait. Langkah awal dalam isu strategis ini adalah pemetaan potensi pada 8 kelurahan di Kota Palu, untuk mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan melihat lima aspek yaitu bahan baku, jumlah usaha dalam industri, keunikan produk dibandingkan daerah lain, nilai tambah produk dan kontribusinya ekonomi daerah. Berdasarkan pemetaan potensi ekonomi, pemerintah melalui dinas terkait akan melakukan penguatan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan pada masing masing industri di tiap wilayah kelurahan.

Dalam upaya menunjang sektor pariwisata, pemerintah Kota Palu akan mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat. Penguatan industri kreatif seperti industri kerajinan, musik, desain, seni pertunjukan, periklanan serta beberapa subsektor yang telah tumbuh di masyarakat, akan di dorong untuk menjadi usaha yang memiliki daya saing di tingkat nasional dengan mengandalkan *komparative advantage* sumber bahan baku lokal.

Penguatan usaha mikro dan kecil akan diupayakan melalui peningkatan ketrampilan usaha seperti pemagangan, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Diharapkan nantinya akan menciptakan penguasa mikro dan kecil yang mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, keunikan potensi lokal dan penguasaan pasar lokal.

Pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan akan mendorong peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home industri. Peningkatan keanekaragaman usaha akan diupayakan melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan serta kepastian usaha.

## **6. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

Peningkatan kualitas tata birokrasi atau sering disebut reformasi birokrasi, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Melalui reformasi birokrasi pemerintah Kota Palu, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pengelolaan tata pemerintah juga harus mengadopsi nilai budaya dan adat daerah dalam kerangka kearifan lokal. Diharapkan adat dan budaya daerah akan mewarnai aspek pelayanan dan perilaku birokrat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

### **7. Pengembangan Sistem Transportasi Umum**

Salah satu ciri kota yang mulai berkembang adalah, munculnya permasalahan di bidang transportasi yang menjadi sarana mobilisasi masyarakatnya. Pertumbuhan jumlah populasi penduduk dan kendaraan yang tidak diiringi oleh peningkatan luasan dan panjang jalan akan menimbulkan masalah kemacetan yang mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat.

Kondisi ini mulai dirasakan oleh penduduk Kota Palu dalam kurun 3 tahun terakhir, pada berapa ruas jalan yang sering terjadi kemacetan khususnya pada beberapa wilayah yang pertumbuhan ekonomi dan perumahan meningkat. Secara umum rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu sejak tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 rasio panjang jalan dan terhadap jumlah kendaraan wajib uji sebesar 0,31, pada tahun 2014 menurun menjadi 0,22, dan pada tahun 2015 menjadi 0,19. Penurunan rasio ini merupakan dampak dari peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang tidak diiringi oleh peningkatan panjang jalan.

Ketidak sesuaian antara pertumbuhan panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang menyebabkan semakin menurunnya rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Dari data tahun 2016, pertumbuhan panjang jalan tahun 2014 -2015 sebesar 2,26 persen, sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Palu tumbuh sebesar



12,9 persen. Hal inilah yang menyebabkan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan semakin kecil.

Upaya untuk meningkatkan rasio panjang jalan terhadap jumlah jalan dapat ditingkatkan melalui penambahan panjang jalan atau menurunkan jumlah kendaraan pribadi. Penurunan jumlah kendaraan yang melintas dapat diturunkan dengan menyiapkan sarana transportasi umum bagi masyarakat. keberadaan angkutan umum di Kota Palu saat ini semakin menurun, hal ini terlihat dari pertumbuhan rasio izin trayek dari tahun 2013 – 2014 yang menurun cukup drastis yaitu 32,54 persen. Pertumbuhan penurunan rasio izin trayek ini mengindikasikan semakin berkurangnya angkutan umum yang ada di Kota.

Pertumbuhan jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum di Kota Palu juga masih tergolong rendah. Sejak kurun waktu 4 tahun yaitu Tahun 2011 hingga Tahun 2015 hanya mencapai 9,47 persen. hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkurangnya penduduk Kota Palu yang memanfaatkan angkutan umum. Selain itu juga dapat disebabkan oleh jumlah angkutan umum yang semakin menghilang.

Terminal yang menjadi sarana angkutan umum untuk menurunkan dan mengangkut penumpang juga merasakan dampak penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2015 jumlah penumpang yang masuk di terminal mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 35 persen. Penurunan jumlah penumpang yang turun dan naik angkutan umum di terminal selain menunjukkan berkurangnya jumlah angkutan umum, juga berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi terminal.

Berdasarkan masalah berkaitan dengan transportasi umum di Kota Palu tersebut, pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk mengembangkan transportasi umum untuk mengurai kemacetan yang akan terjadi manakala tidak terkontrolnya pertumbuhan kendaraan pribadi. Infrastruktur berkaitan dengan transportasi di arahkan untuk mengembangkan moda transportasi umum yang dapat menjangkau

masyarakat miskin yang tidak memiliki sarana transportasi pribadi. Pengelolaan trayek kota dan penyiapan armada angkutan umum menjadi target untuk mengurangi jumlah kendaraan yang sesuai dengan rasio kecukupan kendaraan dengan badan jalan. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dengan keterbatasan luasan badan jalan akan menjadi bom waktu di kemudian hari apabila tidak diantisipasi dengan penyediaan layanan transportasi umum yang memadai, terjangkau dan mudah bagi masyarakat.

#### **8. *Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya***

Salah satu wujud kota dicerminkan dari ketersediaan infrastruktur pendukung layanan kepada masyarakat. Ketersediaan jalan, jembatan, transportasi jaringan irigasi, air bersih, penerangan jalan serta beberapa infrastruktur lainnya menjadikan salah satu tolak ukur layanan pemerintah kepada masyarakat.

Kondisi infrastruktur jalan Kota Palu masih lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ketersediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi sebuah keharusan, mengingat Palu menjadi cerminan Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan salah satunya drainase, kondisi drainase yang kurang memadai dan tidak terkelola dengan baik, mengakibatkan banjir ketika hujan turun. Di beberapa ruas jalan sering terjadi genangan air akibat meluapnya air dari drainase yang tidak mampu menampung air ketika hujan.

Pengembangan infrastruktur berupa bangunan pemerintah dan sarana publik akan di arahkan untuk berorientasi pada ornamen budaya lokal yang dapat mencirikan identitas Kota. Infrastruktur yang akan dikembangkan diharapkan akan dapat mendukung pariwisata yang berbasis pada budaya

lokal. Infrastruktur publik akan mencerminkan maskot Kota Palu dan menjadi bahan promosi pariwisata budaya Kota Palu.

### **9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Pemukiman Kota**

Pengelolaan tata kota yang ramah lingkungan diarahkan untuk meningkatkan persentase Ruang Terbuka Hijau di dalam Kota. Ketersediaan ruang terbuka hijau akan memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat serta menumbuhkan lingkungan yang sehat. Pemerintah akan mendorong penataan kota yang konsisten yang berpedoman pada RTRW, yang juga memberikan ruang yang cukup besar bagi keberadaan UMKM pengelola potensi lokal.

Pengelolaan sampah di arahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah mandiri oleh keluarga sebelum di buang di TPA. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah sampah akan menurunkan persentase sampah yang terbuang ke TPA, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan pengolahan daur ulang limbah masyarakat. Selain pengelolaan sampah mandiri masyarakat upaya peningkatan kebersihan Kota juga dilakukan melalui ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah masyarakat.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Palu. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru.

### **10. Pembangunan Berbudaya Dan Beradat**

Pembangunan berbudaya dan beradat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sosial yang mengacu pada nilai-nilai budaya dan adat daerah yang selama ini mulai ditinggalkan. Pembinaan, Penguatan dan

Pengembangan Peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial akan menjadi prioritas utama untuk membangun kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Penerapan nilai-nilai berbudaya dan beradat di tengah masyarakat akan dikawal oleh lembaga adat dan perangkatnya, sehingga pembentukan dewan adat, dewan suro, dan pembentukan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan, Keindahan dan Kekeluargaan) akan menjadi motor penggerak bagi penerapan nilai-nilai budaya dan adat daerah.

Penguatan nilai-nilai berbudaya dan beradat juga akan di bangun sejak kecil melalui pendidikan budaya pada pendidikan dasar Kota Palu. Pengenalan situs sejarah Kota Palu, budaya dan adat yang ada di Kota palu, serta pembentukan sanggar seni di tiap sekolah dasar dan menengah akan meningkatkan pemahaman dan kecintaan murid pada budaya dan adat daerah